

BAB I

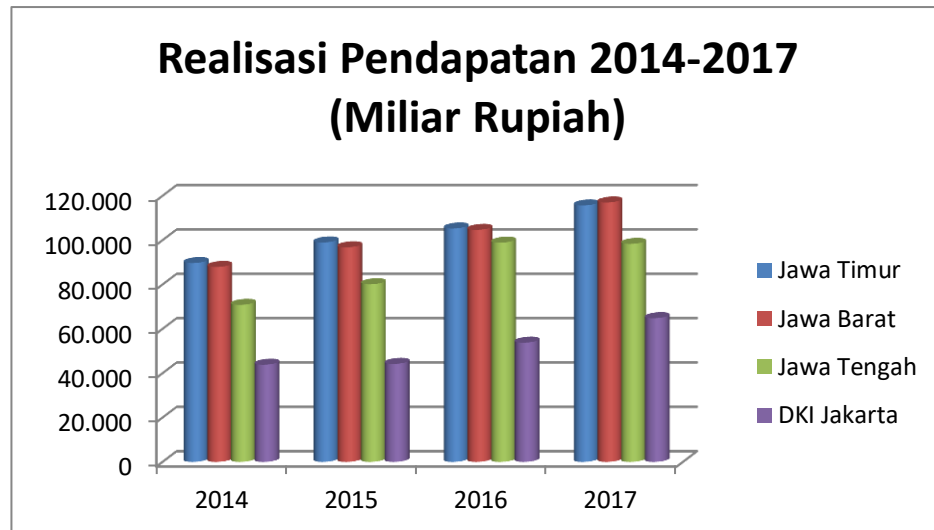
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017, Penduduk Jawa Timur sebanyak 42.030.633 jiwa. serta memiliki potensi pariwisata dan budaya yang sangat kaya, Jawa Timur memiliki kabupaten dan kota yang berjumlah 38 terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota dengan 666 kecamatan dan 8.501 desa/kelurahan. Luas wilayah provinsi Jawa Timur secara keseluruhan mencapai 47.922 km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. (*Jatimprov.go.id*)

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki realisasi pendapatan terbesar pertama pada tahun 2014, 2015, 2016 akan tetapi pada tahun 2017 memiliki realisasi pendapatan terbesar ke 2 setelah Jawa Barat, di bawahnya di ikuti oleh Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Realisasi pendapatan Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar Rp. 105.267.758.454.297 dengan nilai kinerja keuangan sebesar 1.02197 (102.1%) serta realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 115.647.608.764.863 dengan nilai kinerja keuangan sebesar 0.97756 (97.7%), akan tetapi pada tahun 2017 Jawa Timur mengalami penurunan yang sebelumnya memiliki pendapatan terbesar diantara provinsi lain menjadi ke-2 setelah Jawa Barat, hal ini dikarenakan Jawa Barat mengalami Peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 12% lebih tinggi dari Jawa Timur yang memiliki peningkatan pendapatan sebesar 9.86% dari tahun sebelumnya. (*bps.go.id data diolah*)

Berikut ini merupakan data dari lampiran 2 yang telah diolah dan ditampilkan dalam bentuk gambar, pada gambar 1.1 yang menunjukkan 4 provinsi yang memiliki realisasi pendapatan tertinggi se-Indonesia pada tahun 2014-2017.



Sumber: Visualisasi Data APBD (data diolah tahun 2019)

Gambar 1.1

Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Dan Kota di Indonesia Menurut Empat Provinsi Tertinggi Tahun 2014-2017

Pada gambar 1.1 realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang digunakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melaporkan atau memberikan informasi laporan keuangan daerah tersebut.

Dipilihnya kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki realisasi anggaran pendapatan terbesar pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan nilai kinerja keuangan sebesar 0.95337 (95.3%), 1.00210 (100.2%), dan 1.02197 (102.1%) serta pada tahun 2017 memiliki realisasi pendapatan tertinggi ke dua se-Indonesia dengan nilai kinerja keuangan sebesar 0.97756 (97.75%)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan “suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang bertujuan untuk mengontrol serta mengarahkan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan pendapat lain mengenai otonomi daerah ialah “Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri” (Sujarweni, 2015:231). “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah” (Halim 2016:24). Namun pada kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdapat pada lampiran 3 dan lampiran 4 masih terdapat kabupaten dan kota yang mengalami tidak efisiensi kinerja keuangannya pada tahun 2016-2017, sehingga efisiensi kinerja keuangannya tidak baik atau tidak efisiensi.

Dalam mengukur efisien atau tidaknya kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, menurut Andirfa *et al* (2016) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima, rasio tersebut diukur dengan menggunakan total realisasi pengeluaran dibagi dengan total realisasi penerimaan pemerintah daerah, semakin tinggi hasil persentase kinerja keuangan jika diatas 100% maka bisa disebut tidak efisien karena total belanja lebih tinggi di bandingkan total penerimaannya. Sedangkan jika 100% maka keduanya berimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Dan jika penerimaan lebih tinggi dari pada pengeluaran yang artinya persentasi kinerja keuangannya dibawah 100% maka disebut efisien. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi

kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan menurut Andirfa *et al* (2016) pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan menurut Astiti dan Mimba (2016) belanja modal dan belanja rutin berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga faktor yaitu, belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah.

Faktor pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah belanja modal. Menurut Mohammed *et al.* (2015) berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) “belanja modal adalah penambahan aset tetap dengan cara melakukan perbelanjaan/pengeluaran yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi termasuk biaya pemeliharaan yang memiliki fungsi menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset” (Raka Wijayanto, 2017). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Andirfa *et al* (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan atau dapat diartikan setiap peningkatan belanja modal maka akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian Antari & Sedana (2018) Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, namun pada penelitian Purwasih (2016) belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pada tabel berikut ini menunjukkan persentase efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal dalam 7 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur yang mengalami ketidaksesuaian antara teori tersebut dengan fenomena yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Modal dan Kinerja Keuangan dalam 7
Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/kota	Belanja Modal dan Kinerja Keuangan	2016	2017
1	Kabupaten Jember	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 460.451.300	Rp 708.870.975
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	93,4%	102,2%
2	Kabupaten Pasuruan	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 838.440.054	Rp 492.094.079
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	112,0%	101,2%
3	Kabupaten Mojokerto	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 442.333.406	Rp 576.646.344
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	104,1%	99,6%
4	Kabupaten Magetan	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 286.943.948	Rp 201.215.680
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	106,3%	93,4%
5	Kota Kediri	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 381.845.509	Rp 243.195.558
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	125,8%	102,5%
6	Kabupaten Probolinggo	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 289.647.660	Rp 326.769.685
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	103,3%	99,3%
7	Kota Mojokerto	Belanja Modal (Dalam Ribuan)	Rp 303.737.103	Rp 121.144.916
		Efisiensi Kinerja Keuangan Dalam %	117,1%	94,5%

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2019)

Data pada tabel 1.1 terdapat dua pengambilan data, data pertama merupakan data belanja modal diambil langsung pada *website* bps tanpa diolah sedangkan data selanjutnya merupakan data kinerja keuangan diambil pada *website* bps dan data keseluruhan diolah oleh peneliti. Pada tabel 1.1 terjadinya ketidaksesuaian antara teori yang dinyatakan Andirfa *et al* (2016) tersebut dengan fenomena yang terjadi, hal ini dapat dijelaskan pada kabupaten Mojokerto dan kabupaten Probolinggo yang

mana mengalami peningkatan belanja modal akan tetapi mengalami penurunan efisiensi kinerja keuangan.

Faktor selanjutnya merupakan dana perimbangan, dimana dana perimbangan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, deffersial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiscal).

Menurut Penmendagri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Budianto & Alexander (2016) menyatakan bahwa apabila semakin besar transfer dana perimbangan yang di terima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun hal ini sejalan menurut Andirfa *et al* (2016) menyatakan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan menurut Pradana (2016) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah atau diartikan bahwa setiap peningkatan dana perimbangan maka akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan, namun pada penelitian yang dilakukan Sari (2016) menyatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau diartikan baik peningkatan maupun penurunan dana perimbangan tidak akan diikuti oleh peningkatan ataupun penurunan kinerja keuangan. Pada tabel berikut ini menunjukkan persentase efisiensi kinerja

keuangan pemerintah daerah dan dana perimbangan dalam 7 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur yang mengalami ketidaksesuaian antara teori tersebut dengan fenomena yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

Tabel 1.2
Realisasi Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan dalam 7
Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/kota	Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan	2016	2017
1	Kabupaten Jember	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 2.279.360.485	Rp 2.309.229.753
		Efisiensi Kinerja Keuangan	93,4%	102,2%
2	Kabupaten Pasuruan	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 1.831.738.785	Rp 2.080.303.031
		Efisiensi Kinerja Keuangan	112,0%	101,2%
3	Kabupaten Mojokerto	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 1.315.350.439	Rp 1.343.618.935
		Efisiensi Kinerja Keuangan	104,1%	99,6%
4	Kabupaten Magetan	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 1.240.909.563	Rp 1.243.820.501
		Efisiensi Kinerja Keuangan	106,3%	93,4%
5	Kota Kediri	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 842.341.149	Rp 839.311.216
		Efisiensi Kinerja Keuangan	125,8%	102,5%
6	Kabupaten Probolinggo	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 1.321.918.308	Rp 1.345.461.046
		Efisiensi Kinerja Keuangan	103,3%	99,3%
7	Kota Mojokerto	Dana Perimbangan (Dalam Ribuan)	Rp 555.962.488	Rp 519.341.294
		Efisiensi Kinerja Keuangan	117,1%	94,5%

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2019)

Data pada tabel 1.2 terdapat dua pengambilan data, data pertama merupakan data dana perimbangan diambil langsung pada *website* bps

tanpa diolah sedangkan data selajutnya merupakan data kinerja keuangan diambil pada *website* bps dan data keseluruhan diolah oleh peneliti. Pada tabel 1.2 terjadinya ketidaksesuaian antara teori yang dinyatakan Andirfa *et al* (2016) tersebut dengan fenomena yang terjadi, hal ini dapat dijelaskan Pada kabupaten Jember, kota Kediri dan kota Mojokerto. kabupaten Jember yang mengalami peningkatan dana perimbangan tetapi mengalami peningkatan efisiensi kinerja keuangan sedangkan kota Kediri dan kota Mojokerto yang mengalami penurunan dana perimbangan tetapi mengalami penurunan kinerja keuangan. Bentuk dari dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK.

Faktor selanjutnya merupakan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Sebastiana dan Cahyo (2016) pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah, hal ini sejalan dengan penelitian menurut Antari & Sedana (2018) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan atau hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2011-2015 mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2011-2015, sedangkan menurut Wibowo dan Mulyani (2017) pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan atau dapat diartikan peningkatan pendapatan asli daerah maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun

pada penelitian yang dilakukan Andirfa *et al* (2016) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada tabel berikut ini menunjukkan persentase kinerja keuangan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah dalam 7 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur yang mengalami ketidaksesuaian antara teori tersebut dengan fenomena yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan
dalam 7 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/kota	Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan	2016	2017
1	Kabupaten Jember	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 524.137.897	Rp 719.213.581
		Efisiensi Kinerja Keuangan	93,4%	102,2%
2	Kabupaten Pasuruan	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 480.758.720	Rp 759.945.807
		Efisiensi Kinerja Keuangan	112,0%	101,2%
3	Kabupaten Mojokerto	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 447.620.851	Rp 500.518.075
		Efisiensi Kinerja Keuangan	104,1%	99,6%
4	Kabupaten Magetan	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 165.617.751	Rp 212.806.288
		Efisiensi Kinerja Keuangan	106,3%	93,4%
5	Kota Kediri	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 238.318.315	Rp 293.065.134
		Efisiensi Kinerja Keuangan	125,8%	102,5%
6	Kabupaten Probolinggo	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 221.719.364	Rp 302.046.061
		Efisiensi Kinerja Keuangan	103,3%	99,3%
7	Kota Mojokerto	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Ribuan)	Rp 152.462.202	Rp 178.295.062
		Efisiensi Kinerja Keuangan	117,1%	94,5%

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2019)

Data pada tabel 1.3 terdapat dua pengambilan data, data pertama merupakan data pendapatan asli daerah diambil langsung pada *website* bps tanpa diolah sedangkan data selajutnya merupakan data kinerja keuangan diambil pada *website* bps dan data keseluruhan diolah oleh peneliti. Pada tabel 1.3 terjadinya ketidaksesuaian antara teori yang dinyatakan Antari dan Sedana (2018) tersebut dengan fenomena yang terjadi, hal ini dapat dijelaskan Pada kabupaten Jember, yang mengalami peningkatan pendapatan asli daerah tetapi mengalami peningkatan efisiensi kinerja keuangan.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kenaikan ataupun penurunan dalam belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan efisiensi kinerja keuangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian akan pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kenaikan atau penurunan efisiensi kinerja keuangan, maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2017)”.

1.3 Perumusan Masalah

Kinerja keuangan merupakan sistem yang digunakan oleh sektor publik atau pemerintah yang digunakan sebagai tolak ukur finansial yang dilaporkan dalam bentuk kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh peneliti terdahulu namun, memiliki hubungan yang tidak konsisten sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam kinerja keuangan semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka akan semakin baik dalam kinerja keuangan, akan tetapi hal

ini tidak menunjukkan pada tahun 2015 dan 2016 yang memiliki pendapatan daerah terbesar se-Indonesia.

Berdasarkan perumusan yang telah dijelaskan peneliti diatas dapat diperoleh beberapa pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
 - b. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?
 - c. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Dan Kota Jawa Timur pada tahun 2016-2017.

- b. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Dan Kota Jawa Timur pada tahun 2016-2017.
- c. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten dan Kota Jawa Timur pada tahun 2016-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan anantara lain.

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai hasil dari belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur, serta sebagai bahan kajian dalam penelitian dimasa yang akan datang

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai media untuk belajar serta referensi dalam penelitian yang terkait belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kabupaten dan kota dapat mengatasi masalah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan daerah.

2. Bagi Publik

Bagi para pengguna informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi kinerja keuangan kabupaten dan kota pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab ini di akhiri dengan sistematika tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas isi masing-masing bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung solusi permasalahan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknis analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik serta analisis pengaruh variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.